BAB III

FAKTOR EKONOMI DAN SOSIAL SEBAGAI FAKTOR *PUSH & PULL* PEMBELOTAN MASYARAKAT KOREA UTARA KE KOREA SELATAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana situasi ekonomi dan sosial masyarakat Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un. Situasi ekonomi di Korea Utara dijelaskan melalui kejadian berbagai fenomena kebijakan ekonomi pemerintah Korea Utara terhadap masyarakatnya. Selain itu penulis juga menjelaskan situasi ekonomi pembelot Korea Utara di Korea Selatan untuk mendapatkan gambaran akan faktor – faktor terjadinya pembelotan masyarakat Korea Utara ke Korea Selatan.

A. Kebijakan Ekonomi dan Sosial Korea Utara di bawah Kepemimpinan Kim Jong Un

Dewasa ini Korea Utara mulai menjalani sejumlah pertemuan dan menjalin hubungan dengan beberapa negara luar seperti Amerika. Penguatan kerjasama atau hanya konsolidasi merupakan usaha rezim untuk mendapatkan sokongan bagi ekonomi rezim ((CSIS), 2018). Dibalik kegiatan tersebut Korea Utara telah sejak dulu berada dalam keadaan degradasi ekonomi. Dimulai dari gagalnya kekuatan Soviet dan berhentinya dukungannya terhadap Korea Utara, kelaparan yang terjadi karena bencana iklim, inefisisensi sistem politik, dan melemahnya kekuatan legitimasi rezim Kim terhadap masyarakat Korea Utara.

Korea Utara merupakan negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di wilayah Asia-Pasifik. Walaupun program pengembangan nuklir Korea Utara menjadi paling berbahaya dan sangat kuat di dunia, tingkat ekonomi yang dilihat dari kesejahteraan rakyatnya menggambarkan kondisi ekonomi yang buruk ((CSIS), 2018). Implementasi sistem ekonomi yang tertutup oleh pemerintah Korea Utara membuat sebagian besar populasi masyarakat di Korea Utara mengalami kondisi kemiskinan dan kekurangan pasokan bahan makanan hingga saat ini.

Korea Utara menerapkan sistem ekonomi sosialis yang terpusat dibawah pemerintahan rezim Kim. Sistem ekonomi yang mengatur setiap kegiatan ekonomi seperti sistem produksi dan distribusi berada dibawah pengawasan pemerintah pusat di Pyongyang. Sebagaimana dinyatakan dalam artikel 20 Undang-Undang Korea Utara (DPRK) tahun 1998 (Haggard, 2004);

> *"means of production shall be ruled under the possession of the state and social cooperative organization,"*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Korea Utara melarang segala jenis kegiatan ekonomi tanpa pengawasan dan aturan pemerintah pusat di Pyongyang. Segala jenis pengelolaan hasil produksi diatur oleh negara dan pemerintah.

Sistem pendistribusian makanan berdasarkan pada rasio masyarakat merupakan salah satunya, masyarakat Korea Utara mendapatkan jatah pendistribusian sesuai dengan produksi dan jumlah tanggungan keluarga. Sistem tersebut yang awalnya beroperasi secara efektif menjadi korup dan tidak merata sejak akhir periode kepemimpinan Kim Jong-Il. Pada saat Kim Jong Un mengambil alih pemerintahan, maka

sistem rasio tersebut secara total tidak efektif bahkan telah dihapus oleh pmerintah pusat khusunya elit pemerintahan (Coduti, 2016)

Akibat berhentinya sistem rasio pemerintah yang berupa keterbatasan pasokan makanan yang terjadi di Korea Utara maka terjadi *Food Shortages*. Terdapat banyak hal yang menyebebabkan kondisi keterbatasan pasokan makanan di Korea Utara termasuk berhentinya sistem rasio oleh pemerintah Korea Utara. Perserikatan Bangsa - Bangsa baru-baru ini memperkirakan bahwa lebih dari 10 juta orang yang berarti sekitar 40% dari populasi menghadapi kekurangan pangan yang parah (News, 2019)**.**

Kondisi alam Korea Utara yang tidak subur dan rawan terhadap kekeringan juga penyebab kurangnya ketersediaan makanan. Negara komunis ini memiliki musim tanam yang pendek dan lahan pertanian yang terbatas, karena sebagian besar lahan pertanian dalam keadaan subur berada di wilayah Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi jagung dan beras dalam negeri tidak sepenuhnya memenuhi permintaan yang sesuai dengan jumlah produksi (Haggard, 2004). Di Korea Utara kekeringan yang rentan terjadi telah menyebabkan banyak kerugian dan kerusakan. Minimnya ketersediaan air bersih dan meningkatnya malnutrisi menyebabkan sebagian besar penduduk terus menderita kekurangan gizi yang berkepanjangan dan kualitas hidup yang buruk.

Pada waktu yang bersamaan pula terjadi bencana kekeringan dan kelaparan yang menyebabkan kematian hingga jutaan masyarakat Korea Utara. Pada pertengahan tahun 1990-an pemerintah Korea Utara yang pada saat itu juga tengah masa krisis ekonomi tidak mampu memberikan alternatif bantuan bagi masyarakatnya. Sejak saat itu bantuan pasokan makanan mulai mengalir ke dalam wilayah Korea

Utara. Sejumlah organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti *World Food Program* (WFP) dan *Food and Agricultural Organization* (FAO) mengirim bantuan untuk mengatasi kelaparan masyarakat Korea Utara. (Haggard, 2004).

Sejak terjadinya krisis tersebut pemerintah Korea Utara tidak pernah berhasil memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakatnya. Kekurangan makanan secara berlanjut sudah biasa terjadi di luar wilayah Pyongyang. Masalah bagi sebagian besar orang Korea Utara alami bukan pada kualitas makanan melainkan cara mendapatkan bahan makanan yang cukup untuk kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan malnutrisi yang semakin meluas dan banyak anak-anak kekurangan berat badan dan tinggi untuk usia mereka disertai dengan angka kematian yang meningkat.

Sistem distribusi makanan yang semakin cacat dan tidak efektif dilaksanakan secara ketat oleh elit pemerintahan Korea Utara. Semua perdagangan biji-bijian dilarang keras, makanan dikumpulkan dan dijatah melalui sistem distribusi publik di Pyongyang. Semua keputusan produksi dibuat dari pusat pemerintahan di Pyongyang, di mana para pejabat mengeluarkan instruksi terperinci tentang apa dan kapan menanam di masing-masing wilayah pertanian secara kolektif.

Dampak lain dari berhentinya sistem rasio tersebut adalah kemiskinan masyarakat Korea Utara. Pengelolaan sistem distribusi yang hanya terpusat di wilayah Pyongyang membuat wilayah lain semakin tertinggal. Priotitas para elit yang memerhatikan wilayah Pyongyang menyebabkan pembangunan dan perkembangan ekonomi tidak sampai ke wilayah lainnya. Berikut gambaran perbedaan pembangunan ekonomi yang terjadi antara wilayah Pyonyang dan wilayah provisial lain;

Gambar (I), menunjukkan fasilitas dan infrastruktur wilayah di Pyonyang yang lebih maju dan berkembang. Hal ini dibuktikan dengan adanya kendaraan mobil yang menjalani jalan beraspal. Bahkan infrastruktur gedung dan pemukiman penduduk yang lebih elit juga di Pyongyang.

Gambar 3. 1 Contoh Fasilitas Pyongyang

(Sumber: Twitter @nknews.org)

Sedangkan pada Gambar (II), memperlihatkan kondisi infrastruktur dan kegiatan perekonomian masyarakat Korea Utara di wilayah lain di luar Pyongyang. Nampak pada gambar bahwa keadaan atau orientasi pembangunan ekonomi masyarakat di luar Pyongyang yang masih rendah dan kurang berkembang. Orientasi pekerjaan sebagai petani mendominasi penduduk di luar Pyongyang.

Gambar 3. 2 Kondisi Infrastruktur di luar Pyongyang

(Sumber: Twitter @nknews.org)

Atas keadaan kondisi kekurangan tersebut, masyarakat Korea Utara mencoba mencari alternatif secara mandiri untuk mendapatkan sumber makanan tambahan. Tidak hanya makanan, masyarakat Korea Utara juga berusaha mencari alternatif pekerjaan yang menghasilkan uang untuk dapat bertahan hidup. Masyarakat Korea Utara melakukan tindakan yang melawan aturan hingga mengambil risiko atas tindakan mengabaikan peraturan rezim Korea Utara.

Korea Utara telah dihadapkan dengan berbagai tantangan melalui serangkaian peristiwa selama tahun 1990-an yang tentunya menguji kapabilitas pemerintah dalam kinerjanya yang tentunya berdampak terhadap masyarakat Korea Utara. Salah satu tantangan yang paling berpengaruh adalah berhentinya pasokan subsidi secara signifikan dari Soviet dan Cina untuk Korea Utara, subsidi yang pada

dasarnya menjadi sumber pemasukan yang penting dalam mempertahankan ekonomi Korea Utara pada saat itu.

Situasi ekonomi eksternal Korea Utara juga mengalami pergolakan yang tidak bersahabat dengan upaya-upaya pembangunan Korea Utara. Tidak seperti beberapa dekade sebelumnya, Korea Utara tidak lagi dapat menikmati perlindungan dan dukungan ekonomi eksternal dalam blok sosialis. Tanpa bantuan ekonomi dan teknologi dari luar seperti Rusia dan Cina, upaya Korea Utara sendiri untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi akan gagal tanpa adanya dukungan ekonomi dari luar (Lankov, 2013)**.**

Beberapa yang berhasil menyelamatkan diri adalah mereka yang melarikan diri ke wilayah - wilayah seperti Cina dan melanjutkan pembelotan ke negara-negara terdekat dengan mencapai jumlah hingga ratusan ribu pada waktu itu (CSIS, 2018). Peristiwa bencana kelaparan ini terjadi pada masa kepemiminan Kim Il-Sung hingga awal periode kepemimpinan Kim Jong-Il. Akibat dari peristiwa tersebut, sejumlah bantuan internasional yang masuk menjadi awal mula berkurangnya pandangan masyarakat Korea Utara akan kemampuan rezim dalam melindungi masyarakatnya.

Perubahan secara perlahan dari dasar telah terjadi dalam sistem pemerintahan Kim Jong-Un saat ini. Seiring dengan meningkatnya beberapa kegiatan ekonomi secara independen bersama dengan pengaruh kontribusi pihak asing dalam lingkungan masyarakat Korea Utara. Hal ini terjadi akibat krisis ekonomi dan kelaparan yang terjadi di Korea Utara. Dampak dari peristiwa tersebut telah mengangkat isu kapitalisme di kalangan masyarakat Korea Utara yang mencoba mencari alternative peningkatan kualitas ekonomi.

Dibawah pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara mencoba terbuka terhadap kebijakan ekonomi luar negri.

Impor infrastruktur dengan Cina dan Rusia tidak secara instan meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat Korea Utara. Ekonomi masyarakat Korea Utara gagal dan produksi pertanian kurang dari kebutuhan subsistennya. Oleh karenanya Korea Utara membutuhkan sekitar 5,4 juta ton biji-bijian setiap tahun untuk disalurkan terhadap kebutuhan rakyat (Herald, 2010).

Menurut laporan bank sentral Korea Selatan yang memperkirakan pendapatan nasional Korea Utara dengan rata-rata capaian standar kehidupannya adalah 1,250 dollar per orang pada tahun 2011 dibandingkan Korea selatan dengan jumlah 23,400 dolar per orang (Herald, 2013). Oleh karena itu, kelaparan tetap menjadi masalah utama secara nasional karena jumlah makanan yang tersedia tidak pernah meningkat melebihi jumlah kebutuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2002 Korea Utara mengalami inflasi mata uang secara besar-besaran pasca terjadinya krisis moneter tahun 1997. Hal tersebut mendorong Korea Utara memperbarui kebijakan ekonomi dalam negri. Pada tahun 2004 pemerintah Korea Utara mengumumkan kebijakan devaluasi mata uang yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dolar dan mata uang asing lain di Korea Utara (Ford, 2018). Sejak saat itu pemerintah Korea Utara mengizinkan sejumlah pengusaha bisnis swasta ataupun masyarakat biasa untuk menukarkan modal dan tabungannya terhadap mata uang asing di Korea Utara.

Kebijakan devaluasi tersebut berhasil dan memberikan dampak di beberapa bidang seperti pertanian dan agrikultur. Keberhasilan atas kontrol pasar dan menekan inflasi berlangsung sementara namun tidak dalam waktu yang lama. Kebijakan yang diberlakukan dibawah kepemimpinan Kim Jong Il tersebut justru membuat ekonomi masyarakat Korea Utara menjadi lebih sulit. Hal tersebut terjadi karena

pemerintah Korea Utara mengeluarkan peraturan baru yang menetapkan larangan penggunaan mata uang asing, menetapkan harga barang resmi, dan bahkan menetapkan batas waktu operasional pasar serta barang-barang yang boleh untuk diperjual-belikan (Noland, 2010).

Pemerintah Korea Utara menutup kebijakan tersebut dengan menghentikan kegiatan transaksi mata uang asing. Hal itu terjadi karena dampaknya yang tidak menstabilkan ekonomi masyarakat Korea Utara sekaligus memungkinkan adanya ancaman – ancaman terhadap stabilitas rezim. Berdasarkan pada laporan Lembaga Penelitian Keuangan Korea, dampak dari kebijakan tersebut secara tidak langsung menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Korea Utara terhadap kekuatan ekonomi Korea Utara (Noland, 2010)

Keterpurukan ekonomi yang dihadapi masyarakat Korea Utara menyebabkan banyak korban yang meninggal maupun yang berpindah. Sebanyak 3 juta jiwa yang berarti mungkin 2,5 hingga 15 persen dari populasi Korea utara pada saat itu meninggal karena kelaparan (Haggard, 2004). Dampak dan kerugian dari peristiwa krisis tersebut akan terus mengalami peningkatan, persentase kematian dan masyarakat yang membelot akan menjadi lebih tinggi jika pemerintah Korea Utara tidak mampu menyediakan alternatif lain untuk menyelamatkan keadaan ekonomi masyarakat Korea Utara.

Korea Utara adalah sebuah negara kecil yang mampu mempertahankan kontrol politik yang ketat atas penduduknya. Dalam sistemnya, pemerintah Korea Utara membatasi akses pihak asing terhadap internal Korea Utara, walaupun begitu Korea Utara tidak mampu membuat perubahan dan menyediakan kebutuhan masyarakat Korea Utara yang paling mendasar secara sosial maupun ekonomi. Sebagai akibat dari inefisiensi sistem ekonomi masyarakat Korea Utara, sistem

sosial yang telah berusaha dibangun oleh Korea Utara sejak rezim dibangun juga mulai mengalami kehancuran.

Beberapa kalangan masyarakat Korea Utara menyadari dan menemukan adanya kesalahan dengan sistem ekonomi negaranya. hal ini mendorong masyarakat Korea Utara sebagiannya untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan informal atau pasar bebas.

B. Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Korea Utara di bawah Kepemimpinan Kim Jong Un

1. Kegiatan Pasar Ilegal di Korea Utara

Aktivitas kegiatan pasar ilegal *(Black Market)* mulai meningkat dikalangan masyarakat Korea Utara. kegiatan pasar ilegal ini juga disebut dengan *Bottom-Up Marketization* yang merupakan sebutan untuk perkembangan aktifitas pasar dikalangan masyarakat ekonomi rendah di Korea Utara. Keberadaan pasar ilegal ini merupakan bukti dari kegagalan pemerintah dalam mengontrol dan mengoperasikan sistem ekonomi di Korea Utara. Kegiatan pasar ilegal *(Black Market)* ini merupakan cara alternatif masyarakat Korea Utara untuk bertahan dari kemiskinan dan kelaparan di Korea Utara.

Pasar gelap awalnya mulai berkembang pada 1990 - an ketika situasi ekonomi Korea Utara mengalami banyak kegagalan, membuat segala jenis kebutuhan apapun kurang dapat diakses (Haggard, 2004). Tetapi dalam satu dekade ini, kegiatan *Black Market* telah tumbuh dan membawa dampak lebih luas bagi masyarakat Korea Utara. Kemudian sekitar tahun 2002, pemerintah Korea Utara mengakui untuk mengizinkan beberapa kegiatan pasar berjalan secara

legal sebagai cara untuk mengatasi kekurangan pangan dan komoditas lainnya. Tetapi garis antara kegiatan pasar legal dan ilegal sering tidak jelas dalam kegiatan pasar di kalangan masyarakat Korea Utara.

Pasar menjadi sumber makanan utama bagi masyarakat kelas rendah di Korea Utara. Sistem pendistribusian yang tidak merata oleh pemerintah tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga masyarakat harus secara mandiri melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu kegiatan pasar ilegal ini juga memberikan dampak terhadap meluasnya berbagai barang dan jasa, pola pikir pasar, dan motif orientasi keuntungan yang menyebar di seluruh kalangan masyarakat *Hostile Class* di Korea Utara.

Sistem ekonomi di Korea Utara yang dikelolah oleh partai dan rezim sangat berpihak pada masyarakat Korea Utara di Pyonyang. Melalui klasifikasi sistem *Songbun*, pemerintah juga mengklasifikasi pendistribusian dan pemeratan ekonomi sesuai dengan kelompok sosial tersebut. Berkembangnya bisnis – bisnis swasta dalam pasara ilegal menunjukkan masyarakat Korea Utara yang kecewa terhadap retorika negara yang selama ini dipercayai oleh masyarakat Korea Utara.

Banyak masyarakat Korea Utara yang ikut dalam kegiatan pasar ini terlibat dalam kegiatan ilegal yang dilakukan secara bersama seperti bisnis ilegal dan berkumpul dengan sekelompok kecil masyarakat lainnya untuk menonton film asing atau hanya mendengarkan siaran radio (Habib, 2008). Hal

tersebut membuat faktor – faktor ini menjadi sangat berpengaruh, di samping itu sebagian besar warga Korea Utara yang tidak lagi bergantung pada adanya fungsional pemerintah pusat untuk mendapatkan makanan atau pekerjaan.

Partisipasi secara massa dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan produk terlarang atau diskusi tentang informasi luar yang 'subversif' mengarah pada saling ketergantungan, pembangunan kepercayaan, dan normalisasi pandangan atau persepsi melalui kegiatan tersebut di kalangan masyarakat Korea Utara (Habib, 2008). Hal ini tentunya dapat mendorong terhadap kegiatan – kegiatan lain seperti diskusi pribadi dan penguatan ikatan antara masyarakat Korea Utara. Pada akhirnya ini dapat menghasilkan ruang bagi masyarakat sipil untuk berkembang yang secara situasi iklim pasar terpisah dari rezim pemrintahan Korea Utara.

Walaupun aparat keamanan dengan sistem represifnya yang masih sangat efektif untuk melaporkan segala macam tindakan terhadap elite pemerintahan, masyarakat tetap terbuka dengan berbagi pandangan mereka, tetapi mereka masih sangat berhati-hati, dan apapun yang lebih dari kritik pribadi terhadap rezim dalam kelompok masyarakat atau kerabat yang dipercaya masih terlalu berisiko.

Fenomena perubahan sosial yang disebabkan kegiatan pasar gelap *(Black Market)* di Korea Utara ini memberikan kontribusi pada pergerakan dan perkumpulan di kalangan masyarakat Korea Utara. Dengan adanya kegiatan pasar ini masyarakat memisahkan diri dari negara tidak hanya di tingkat

individu tetapi semakin meningkat di tingkat kelompok masyarakat (Bennett, 2013). Dalam satu dekade terkahir populasi masyarakat Korea Utara dapat bertahan hidup karena kemunculan aktivitas pasar ilegal.

Sejak pemerintah Korea Utara mulai melunakkan kebijakan keuangan pada saat masa devaluasi, pemerintah memberikan kesempatan pada pelaku dagang sektor bisnis swasta untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dan dapat bertahan hidup diluar dari bantuan distribusi pemerintah (Korea L. i., 2017). Meski begitu Korea Utara masih gagal dalam mengatur produksi ekonomi dan agrikultur dengan tidak mampu mencukupi sejumlah besar kebutuhan dasar masyarakat yang menyebabkan kelaparan sampai sangat menderita.

Saat ini bukti dari melemahnya kualitas kepemimpinan Kim adalah bahwa adanya kegiatan pasar. Perempuan - perempuan Korea Utara yang terlibat termasuk dalam usia produktif memperdagangkan barang-barang yang diselundupkan dari Tiongkok (Bennett, 2013). Pelaku bisnis di dalam pasar ilegal tersebut ingin mendapatkan akses barang lebih banyak yang dapat diperjual-belikan di Korea Utara. Dalam situasi kepercayaan yang berkurang terhadap pemerintah, kegiatan pasar ilegal ini mendorong masyarakat untuk membelot.

Meskipun pada saat yang sama pemerintah Korea Utara menyadari bahaya keberadaan kegiatan pasar bebas ini sebagai ancaman. Oleh karena itu, Kim Jong Un yang sejak kepemimpinanya terus

memperketat pengawasan dan patroli terhadap masyarakat oleh tentara dan aparatur negara. Dalam kondisi pengawasan yang ketat tersebut, sejumlah pedagang dalam lingkungan *Black Market* ini disebut *'grasshoper'* karena mereka akan dengan sigap berkemas dan melarikan diri setiap kali mereka melihat aparat keamanan mendekat agar tidak tertangkap (Sang-Hun, 2017)

Banyak pengamat yang melihat bahwa kondisi pasar tersebut secara tidak langsung mampu mendongkrak ekonomi masyarakat Korea Utara secara independen walaupun masih dalam proses yang lambat. Menurut seorang pengamat ekonomi, Marcus Noland mengatakan meskipun sanksi ekonomi terhadap Pyongyang tetap berlanjut dan meningkatnya pengaruh perang dagang dan kebijakan devaluasi telah merusak kulaitas ekonomi Korea Utara khusunya secara internal, namun liberalisasi pasar domestik telah membantu meningkatkan dan memandirikan masyarakat Korea Utara untuk bertahan hidup (Newton, 2016)

Respon negatif yang ditunjukkan keadaan ekonomi setelah implementasi kebijakan reformasi sebelumnya megharuskan pemerintah Korea Selatan mengevaluasi kembali kebijakan ekonomi negaranya sekali lagi. Dengan kebijakan akhir yang diambil oleh pemerintah yaitu melonggarkan kontrolnya pada aktivitas ekonomi pasar yang membawa kepada suatu kondisi yang tampaknya akan berlanjut (Bennett, 2013)

Selain itu, dampak lain yang membawa aktivitas pasar ilegal ini menjadi dorongan masyarakat Korea Utara untuk membelot adalah masalah patriarki dalam rumah tangga, dimana baik

suami maupun istri mulai bekerja untuk mendongkrak ekonomi keluarga (Chung B.-H. , 2008). Fenomena tebaru yang tidak terjadi beberapa dekade yang lalu, seperti penggunaan DVD dan USB dengan berisi data informasi dapat ditemukan secara diam-diam dalam lingkungan pasar gelap. Pasar gelap telah mendorong sejumlah orang bergantung pada praktik kapitalistik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih yanag mana oleh kegiatan ini mendorong lebih banyak keraguan masyarakat terhadap rezim. (Chung B.-H. , 2008)

Berdasarkan pada sebuah survei yang dilakukan oleh Harden adalah mengenai jangkauan pasar-pasar tersebut di semua strata masyarakat Korea Utara, dengan hampir 70 persen hasil survei mengatakan bahwa setengah atau lebih dari pendapatan mereka berasal dari transaksi bisnis swasta dalam lingkungan *Black Market* tersebut. (Bennett, 2013)

Keberadaan kegiatan pasar ilegal *(Black Market)* yang masyarakatnya mulai terbiasa dengan sistem kapitalis tanpa adanya pantauan rezim pemerintah ini telah menumbuhkan dorongan dan kesadaran masyarakat Korea Utara akan kegagalan pemrintah meningkatkan status ekonomi bangsanya. Hal ini membuat masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi tanpa harus menunggu aturan distribusi pemerintah yang bahkan tidak rasional (Baek, 2016).

2. Tingkat Suap dan Korupsi yang Semakin Tinggi

Pada masa pemerintahannya Kim Jong-Un memperkuat posisi kepemimpinanya melalui sistem kontrol sosial dengan tindakan penanggulangan

terhadap suap, tetapi di sisi lain sistem kontrol sosial Korea Utara telah mengalami penurunan dengan adanya perkembangan dikotomi antara orang elit dan masyarakat biasa (Bidet, 2009). Dikotomi ini telah menciptakan lingkungan yang subur untuk melakukan tindakan suap -menyuap pejabat pemerintahan dan aparat keamanan yang makin mengakar di masyarakat.

Sistem kontrol oleh para personel keamanan dan pejabat pemerintah yang sering kali dapat dijatuhkan dengan membayar suap. Hal seperti ini mudah terjadi karena pendapatan yang tidak cukup dan keinginan untuk menambah penghasilan mereka dengan menerima suap, dan beberapa bahkan melakukan pemerasan terhadap masyarakat yang tertangkap melakukan kegiatan yang ilegal (Bennett, 2013)

Masyarakat Korea Utara memiliki kesempatan dan sarana untuk menawarkan suap. Hal ini dilakukan ketika masyarakat termotivasi untuk melakukannya demi memajukan kepentingan bisnis dan bertahan hidup. Membludaknya kegiatan korupsi dan suap yang tidak hanya terjadi di antara para pejabat birokrasi tetapi juga korupsi di angkatan bersenjata atau militer (Coduti, 2016). Kegiatan ini menjadi begitu besar dan meluas sehingga pemerintah mengizinkan polisi sipil (People’s Safety Agency) untuk menyelidiki kasus-kasus personil militer yang diduga melakukan tindakan korup.

Sebelumnya polisi militer juga diberikan mandat menangani penyelidikan tindakan korupsi, tetapi pemerintah telah menduga polisi militer juga korup sehingga tidak lagi dipercaya untuk melakukan investigasi. Kegiatan investigasi yang biasanya

dilakukan adalah menemukan dan menghukum tentara yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti mencuri, membantu penyelundup atau pembelot untuk menyeberangi perbatasan (Bennett, 2013). Semua kegiatan tersebut dianggap mencerminkan keburukan terhadap *National Security Agency* yang juga dianggap korup.

Alasan lainnya meningkatnya kegiatan korupsi merupaka upah yang sama yang tidak menjangkau kebutuhan hidup secara kesleuruhan. Di Korea Utara beberapa bidang pekerjaan tidak pernah mengalami kenaikan penghasilan, sehingga sebagian besar dari mereka telah mengirim beberapa anggota keluarga mereka untuk terlibat dalam pasar ilegal dan bahkan menjadikan suap sebagai tujuan akhir. Sebagai sumber upah untuk mendapatkan hidup mereka di Korea Utara dan cara lain untuk menghindari kelaparan dan bertahan hidup dengan mandiri dari pemerintah. (Bennett, 2013)

Karena suap telah menjadi praktik yang lebih diterima dalam lingkungan masyarakat Korea Utara, suap menjadi lebih integral dengan cara hidup Korea Utara. mereka yang memiliki uang umumnya dapat melanjutkan kegiatan pasar bahkan di daerah atau cara yang biasanya ditentang oleh pejabat setempat, sesuai dengan dogma pemerintah.

Mereka yang memberikan suap sering membuat diri mereka atau kerabat mereka keluar dari masalah yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Tindakan suap dan korupsi sangat memihak kepada orang – orang yang memiliki jumlah uang yang banyak. Singkatnya mereka secara efektif menempatkan diri mereka di atas arahan pemerintah karena mereka memberikan uang suap yang sering

dibutuhkan pejabat lokal untuk bertahan hidup ataupun pergi melakukan perjalanan (Bennett, 2013).

Ada dua kegiatan korupsi yang menjadi akar kemunculan kegiatan – kegiatan lainnya (Habib, 2008): yang pertama, tindakan suap menyebabkan masyarakat Korea Utara menghindari sistem kontrol oleh pemerintah Korea Utara. Kedua, bahwa para pejabat memeras suap dari warga yang putus asa berusaha untuk bertahan hidup selama periode kekurangan makanan dan kelaparan bahkan hingga sekarang. Orang-orang lapar yang melanggar pembatasan perjalanan dalam mencari makanan adalah sasaran mudah bagi petugas keamanan dengan seringnya memeras masyarakat yang secara tidak langsung mengakar di kebiasaan masyarakat.

Meningkatnya prevalensi kegiatan pasar gelap di Korea Utara di seluruh negeri bagian Korea Utara memancing memunculkan budaya suap yang mengakar dalam lingkungan masyarakat (Bennett, 2013). Kekuatan sistem pasar gelap yang aktif beroperasi saat ini dan merebaknya penyuapan telah mulai secara serius merusak dominasi sistem ekonomi pemerintah.

Meledaknya jumlah kegiatan suap dan korupsi di Korea Utara merupakan dorongan yang paling besar bagi masyarakat Korea Utara untuk melakukan pembelota hingga mencapai Korea Selatan. Masyarakat Korea Utara dengan tindakan suap dan korupsi dalam kalangan elit pejabat negara secara tidak langsung memudahkan masyarakat Korea Utara yang ingin membelot tanpa adanya risiko tertangkap.

3. Perkembangan Generasi *Jangmadang*

Generasi *Jangmadang* adalah sebutan bagi orang-rang yang berada dan tumbuh dalam lingkungan pasar ilegal *(Black Market)*. Dalam lingkungan kegiatan pasar yang sebelumnya telah dibahas, generasi muda Korea Utara mulai terbentuk dimana orang dewasa berusia 18 hingga 35 tahun yang lahir dalam kurun era 80-an dan 90-an mewakili 25 persen dari populasi yang hampir 25 juta (Baek, 2016). Dalam periode situasi keterpurukan ekonomi negara sosialis inilah muncul generasi muda kapitalis yang tak diduga secara langsung mendorong adanya keinginan untuk membelot.

Generasi muda *Jangmadang* ini dibentuk oleh sistem kapitalis pasar yang mengajarkan mereka cara mengelola dan menghasilkan uang. Selain itu akibat dari keterpurukan ekonomi yang terjadi dalam kalangan masyarakat, generasi ini secara langsung mengetahui konsep untung dan rugi, mereka juga menjadi dewasa di tengah akses teknologi dan media asing yang belum pernah terjadi sebelumnya (Ford, 2018).

Jangmadang dalam bahasa Korea secara harfiah berarti *"market grounds"* dan tentunya mengacu pada kegiatan pasar ilegal yang berkembang pada masa krisis ekonomi di Korea Utara. Generasi yang lahir pada dasarnya setelah periode *Great Famine* tumbuh bergantung pada dasar – dasar sifat pasar yang kapitalis dan opportunis. Masyarakat Korea Utara yang lahir pada kurun waktu krisis ekonomi berakhir dan merasakan situasi sistem pasar bebas yang beroperasi secara meluas di Korea Utara akan menjadi tergantung secara penuh terhadap kehidupan pasar dan cara berpikir yang opportunis.

Generasi ini akan menyadari bahwa ketergantungan terhadap sistem ekonomi yang diatur oleh rezim bukan merupakan masalah yang besar, yang terpenting adalah bagaimana setiap individual atau pebisnis mendapatkan keuntungan dan mendapatkan apa yang mereka mau.

Beberapa ciri – ciri yang menggambarkan generasi muda *'Jangmadang'* oleh beberapa peneliti (Baek, 2016);

- Karakter yang kapitalistik, individualistik, dan cenderung mengambil risiko. Fakta bahwa sebagian besar generasi ini tumbuh di atas sistem kapitalisme pasar yang bayak dari mereka terlibat dalam operasi bisnis pnyelundupan dan menjual barang-barang modis yang di dambakan oleh pendudul yang menonton drama Korea Selatan yang ilegal misalnya. Oleh karena itu, fenomena tersebut menghasilkan sifat pertama mereka yang di gerakkan oleh laba, materialistis, dan individualistis.
- Adanya penurunan signifikan terhadap kesetiaan terhadap rezim dan negara, karena banyak dari generasi tersebut menagalami dampak aliran informasi luar yang bertentangan dengan propaganda yang meraka pelajari dari negara. Itu datang untuk membentuk negara dan mereka bahkan tidak bergantung pada subsidi pemerintah untuk bertahan hidup

Meskipun generasi muda Korea Utara ini terus mengikuti hukum dan aturan negara, kalangan muda tetap berbagi berbagai macam anekdot lelucon tentang pemimpin secara

diam-diam (Baek, 2016). Karakteristik cerdas dan tidak loyal yang mereka kembangkan membuat generasi *'Jangmadang'* ini tahu bagaimana mengikuti aturan negara secara sekadarnya. Generasi muda ini memiliki kapabilitas hidup dalam dua realita yang merupakan realitas resmi yang didukung oleh negara Korea Utara dan realitas yang lebih kapitalistik yang menentukan mereka untuk terus belajar tentang dunia luar Korea Utara.

4. Masuknya Informasi Asing ke Korea Utara

Di Korea Utara, blokade pemerintah terhadap akses informasi dunia luar perlahan hancur oleh kegiatan lintas batas, kegiatan pasar ilegal *(Black Market)*, serta akses tehnologi seperti *handphone, USB Driver*, radio, televise dan lainnya (LiNK, 2018). Faktor selanjutnya berupa *the outflow of people* dimana beberapa warga Korea Utara yang telah menjadi pengungsi di Korea Selatan menjembatani duni luar dengan masyarakat Korea Utara.

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan kelaparan yang melanda, masyarakat Korea Utara yang meninggalkan Korea Utara tentunya telah mencapai ratusan ribu orang. Keputusan melarikan diri dari Korea Utara serta resiko melakukan penyebarangan perbatasan Cina – Korea Utara yang besar dan membahayakan tidak mengehntikan sejumlah masyarakat Korea Utara yang ingin membelot (Baek, 2016).

Ideologi yang diterapkan oleh rezim atau dengan kata lain propaganda yang berevolusiner diantara generasi *Jangmadang* ini secara perlahan akan terkikis dari waktu ke waktu tetapi perubahan ekonomi dan informasi telah mempercepat

pertumbuhan sinisme tentang rezim, meskipun komunikasi ketidakpuasan masih berisiko dan kerenanya terbatas. Pasar tidak memiliki tempat dalam ideologi sosialis Korea Utara, dan meningkatnya kesadaran akan dunia luar bertentangan dengan narasi nasional rezim

Korea Utara telah melakukan segala tindakan isolasi untuk mencegah rakyatnya mempertanyakan doktrinasi rezim. Pemerintah Korea Utara telah sejak lama mempertahankan propaganda dengan mencoba menolak akses orang-orangnya ke informasi dunia luar (Baek, 2016). Tindakan penvegahan yang dilakukan negara menggagalkan impor buku dan media elektronik dan menjual radio dan televisi yang hanya memungkinkan penerimaan informasi dari pemeintah Korea Utara saja (Baek, 2016).

Pemerintah mencegah sebagian besar warganya memperoleh telepon seluler Cina karena perangkat ini meneyebabkan adanya kebocoran informasi. Selain itu telepon seluler Cina ynag beredar juga berfungsi sebagai media alternatif untuk menerima berita dari luar Korea Utara di dekat perbatasan Cina (Bennett, 2013). Dalam ranah industri, penutupan Kompleks Industri Kaesong oleh pemerintah Korea Utara pada tahun 2013 telah termotivasi oleh adanya infiltrasi informasi luar melalui Kaesong.

Masuknya informasi melalui berbagai media semakin merambah pengetahuan masyarakat Korea Utara tentang dunia luar. Seorang mantan diplomat Korea Utara dan organisasinya berusaha mengadvokasikan untuk meningkatkan penyebaran informasi luar ke Korea Utara, akhirnya memicu pemberontakan yang mengakar untuk menggulingkan rezim pemerintah Kim (Padden, 2017). Hal ini

menggambarkan bahwa kebocoran informasi dunia luar di Korea Utara dapat menciptakan perubahan dan mengancam keberlangsungan rezim.

Sejak Perang Korea, pemerintah Korea Utara telah mengdoktrinasikan masyarakatnya dengan hanya memberikan izin akses terhadap informasi yang berasal dari media pemerintah (Benhabib, 1986). Namun, faktanya bahwa informasi dari eksternal yang menyebar di Korea Utara menggagalkan setidaknya sebagian dari propaganda Korea Utara juga menghasilkan potensi ketidakstabilan (Baek, 2017).

Ada banyak hal-hal dari informasi yang beredar secara tidak langsung telah menurunkan kredibilitas atas propaganda yang telah sejak lama ditanamkan terhadap masyarakat Korea Utara (Harden B. , 2010). Survei yang dilakukan oleh Bernett menyatakan bahwa terdapat banyak realitas dan fakta bahwa propaganda Kim Jong-Il telah secara perlahan menghilang dengan hampir lebih dari 40% populasi masyarakat Korea Utara pada masa sekarang mendengarkan berita-berita asing (Baek, 2016). Penyebaran informasi luar yang berbeda dari yang mereka ketahui telah menimbulkan sisnisme terhadap rezim dengan meremehkan propaganda dan memunculkan rasa ketidakpuasan di kalangan elit (Ford, 2018)

Kesadaran akan dunia luar yang bertentangan dengan narasi propaganda rezim telah secara regular meningkat. Survei yang dilakukan oleh peneliti Marcus Noland dan Stephen Haggard telah mengidentifikasi beberapa pergeseran informasi di antara masyarakat Korea Utara yang menghasilkan

perubahan sikap masyarakatterhadap rezim (Bennett, 2013):

- Oleh karena tersedianya aliran informasi media asing di kalangan masyarakat, maka hambatan untuk konsumsinya juga menurun. Ketersediaan sumber-sumber informasi alternatif merusak citra heroic pemimpin rezim dan mengancam untuk melepaskan persepsi informasi yang dapat sangat mengganggu kestabilan pemerintahan Korea Utara yang otoriter”
- Sebuah survei telah menemukan bahwa pemerintah biasa memanipulasi ketersediaan pendapatan dan brang-barang musim panas (Bennett, 2013) dan adanya bentuk perlawanan yang telah mengakar disebabkan karena tindakan korupsi yang meningkat, selain itu meningkatnya ketidakadilan dan kekurangan makanan kronis adalah hasil dari kesalahan pemerintah yang gagal mengatur dan menjaga kualitas eonomi Korea Utara sehingga berdampak terhadap kesejahteraan rakyatnya.
- Oleh karena terjadinya kesulitan ini menyadarkan masyarakat Korea Utara bahwa kesulitan yang dialami negara dan masyarakatnya bukan penyeybab dari campur tangan pihak luar melainkan disebabkan oleh rezim. Bahkan masyarakat Korea Utara yang telah berada di luar wilayah Korea Utara menjadi lebih sadar akan keterpurukan ekonomi dan kemiskinan rakyat Korea Utara disebabkan informasi – informasi yang

beredar di sepanjang perbatasan Cina-Korea Utara

- Survei lainnya merupakan sinisme tentang pemerintah Korea Utara yang meningkat di antara para pembelot yang latar belakangnya merupakan kelompok elit pemerintahan atau militer. Sifat tidak loyal dan menganggap lelucon keadaan rezim juga muncul diantara masyarakat dalam kalangan kegiatan pasar bebas *(Black Market)*.

Dalam beberapa tahun terakhir, untuk pertama kalinya penyebaran telepon seluler dan DVD asing mulai melemahkan kampanye propaganda di Pyongyang. Banyak warga Korea Utara khususnya di wilayah perbatasan sekarang sadar bahwa mereka telah menjadi komunitas dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia (Kay, 2014)

Dengan semua informasi yang mengalir ke masyarakat Korea Utara, namun sejumlah besar warga atau individu tidak cukup berani untuk mengambil risiko pembelotan. Beberapa warga memiliki akses ke radio yang telah diputar secara berulang untuk mengambil siaran gelombang pendek *Voice of America* dan *Radio Free Asia* (Baek, 2016). Pengambilan siaran umumnya hanya dapat diakses di wilayah pemukiman yang erada dekat perbatasan Korea Utara dan Cina, sebab itu sebagian masyarakat mampu mengakses jaringan pendek untuk mendengarkan siaran asing dan akses ponsel Cina.

Sekitar dua puluh ribu warga Korea Utara yang tinggal di sepanjang perbatasan Cina memiliki akses ke telepon seluler pada awal 2005 (LiNK, 2018). Lebih dari separuh populasi masyarakat Korea

Utara telah menonton film-film Korea Selatan dan program-program televisi yang diselundupkan ke negara itu melalui video dan DVD secara ilegal. Teknologi informasi yang modern mampu mendobrak hambatan kontrol informasi yang dapat mengekspos poin – poin propaganda resmi. Infromasi yang mengalir bahkan mengancam legitimasi lembaga-lembaga negara dan memicu perbedaan pendapat serta aktivitas pelanggaran dari kalangan bawah.

Peningkatan aliran informasi ke Korea Utara dari dunia luar akan menciptakan perasaan disonasi kognitif di antara mereka yang terpapar akan informasi tersebut (Baek, 2016). Hal ini memungkinkan mereka memberikan efek frustasi yang telah lama terinternalisasi di kalangan masyarakat Korea Utara. Dengan dasar perbandingan yang diketahui, masyarakat Korea Utara dapat saja menunjukkan sikap untuk menolak ideologi Korea Utara.

Etika retorika dan propaganda resmi mengalami perusakan akibat dari doktrinasi–doktrinasi yang dipertanyakan. Paradigm ideasional negara terkikis secara perlahan dan institusinya kehilangan legitimasi. Meningkatnya frekuensi laporan pembelotan di Korea Utara menunjukkan adanya kebencian yang mengakar di kalangan masyarakat yang mungkin telah mencapai titik kritis dan berubah menjadi mobilisasi massa secara diam - diam.

Seorang peneliti di lembaga *Korean Institution for National Unification* (KINU) yang telah mewawancarai beberapa para pembelot Korea Utara selama dua puluh tahun. Dari hasil melakukan

wawancara tersebut mengatakan bahwa tidak ada pembelot Korea Utara yang tidak menggunakan akses media informasi asing dalam mempertimbangkan pembelotan. Para pembelot yang barasal dari wilayah tertentu di Korea Utara banyak yang mengatakan bahwa beberapa dari kerabat mereka bahkan memutuskan untuk tetap di Korea Utara mengkonsumsi informasi media asaing. (Baek, 2016)

Menjadi hal yang relevan juga untuk mempertimbangkan bahwa sekitar 76 hingga 84 persen dari semua pembelot yang menetap di Korea Selatan saat ini berasal provinsi Hamgyong Utara atau provinsi Ryanggang (Yoon I.-J. , 2001), yang merupakan provinsi yang berbatasan yang berbatasan dengan perbatasan Korea Utara – Cina dan dianggap menerima paling banyak siaran media asing. Kesaksian seorang pembelot muda yang menyatakan bahwa pendapat bahwa informasi asing adalah komponen yang diperlukan, tetapi tidak cukup, untuk menciptakan perubahan positif di dalam negri.

Faktor informasi ini memberikan informasi dan pilihan yang lebih banyak bagi masyarakat Korea Utara. Merupakan suatu kemungkinan bagi seseorang untuk pergi ke Cina setelah menonton film untuk mengejar kekayaan ekonomi, megakses lebih banyak informasi di Cina, dan kemudian memutuskan untuk pergi ke Korea Selatan. Selain itu bantuan yang dilakukan oleh pembelot Korea Utara yang terdahulu terbukti mendongkrak jumlah kedatangan pembelot Korea Utara di Korea Selatan. Berdasarkan pada laporan *Ministry of Unification* Korea Selatan mengatakan bahwa sebagian besar pembelot yang berdatangan merupakan hasil dari bantuan *broker* atau

penyelundup yang merupakan mantan pembelot yang kebanyakannya telah menetap di Korea Selatan.

Pada masa sekarang ini pengungsi Korea Utara yang telah menetap di Korea Selatan menjalankan beberapa peran dengan maksud membantu dan menjemabatani masyarakat Korea Utara lainnya yang ingin keluar dari Korea Utara. Hal ini dilakukan karena keprihatinan pengungsi Korea Utara di Korea Selatan terhadap kehidupan dan situasi kemanusiaan yang dialami oleh masyarakat Korea Utara. beberapa peran yang sangat signifikan yaitu (Korea L. i., 2017):

- Komunikasi dan Informasi, beberapa dari masyarakat Korea Utara yang terlebih dulu telah melakukan perpindahan meningkatkan dan menjaga komunikasi. Pembelot terdahulu umunya melakukan komunikasi dengan keluarga yang masih berada di Korea Utara termasuk mengirimkan kabar dan informasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat Korea Utara mengenai keadaan dunia luar Korea Utara.
- Kiriman bantuan, selain itu para pembelot di luar wilayah Korea Utara berusaha mengirimkan pasokan makanan dan sejumlah uang untuk kelangsungan hidup keluarga mereka di Korea Utara atau untuk membiaya pembelotan anggota keluarga yang berencana untuk membelot.
- Advokasi bantuan dan kesadaran masyarakat internasional, para pembelot yang telah lebih dulu melakukan pembelotan berusaha memberikan informasi dan mengadvokasikan keadaan buruk masyarakat Korea Utara. Alhasil kebanyakan masyarakat internasional telah menyadari kondisi

> saat ini mengenai Korea Utara. kegiatan advokasi melalui organisasi non-profit atau gerakan lainnya telah menyadarkan masyarakat internasional akan kondisi kemanusiaan masyarakat Korea Utara yang sangat buruk dan terkekang oleh rezim.

Masyarakat Korea Utara menjadi lebih menyadari adanya peningkatan jumlah warga negaranya yang memutuskan untuk meninggalkan Korea Utara. Sebagaimana yang mereka ketahui bahwa warga negara yang telah membelot telah memiliki hidup yang lebih baik di negara tujuan. Faktor – faktor yang telah dijelaskan diatas mempengaruhi keputusan masyarakat Korea Utara hingga akhirnya memutuskan untuk membelot. Karena itu rezim sangat prihatin sekaligus terancam tentang dampak pertumbuhan gerakan dan kontak lintas – batas yang ilegal.

Kegiatan transaksi dan penyelundupan barang-barang asing telah mendorong masyarakat untuk meninggalkan Korea Utara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, meningkatnya kegiatan korupsi yang menghapuskan segala risiko besar terhadap ancaman dan hukuman, dan berkembangnya generasi *Jangmadang* yang berusia 20-an hinga 30-an tahun secara aktif berperilaku kapitalis dan pikiran yang liberalis dan tentunya tidak bersandar pada aturan pemerintah.

Rezim pemerintahan Korea Utara terus meningkatkan keamanan dan sanksi hukuman dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas perbatasan dan pergerakan masyarakat. Tetapi hingga masyarakat Korea Utara mencapai tujuan dan dapat menjalani kehidupan yang layak mereka dapatkan, mereka akan selalu menemukan cara untuk mengatasi tantangan pembatasan dan pengawasan rezim dan bahkan menerobos sistem kontrol. Dan oleh sebab itu, kebijakan rezim saat ini tidak menghentikan fenomena

pembelotan masyarakat Korea Utara. kebijakan rezim hanya menghambat laju pembelotan masyarakat orea Utara ke Korea Selatan.

C. Fasilitas Ekonomi dan Sosial di Korea Selatan

Kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap pengungsi Korea Utara mengalami perubahan beberapa kali. Sejak tahun 1980-an kebijakan Korea Selatan terhadap pengungsi Korea Utara telah mendukung dan menfasilitasi pembelot yang datang ke Korea Utara. Sejak saat itu orientasi pekerjaan pembelot dari mulai pejabat pemerintah, pejabat professional, diplomat hingga militer yang tidak lebih dari 100 orang. Namun setelah terjadinya krisis dan bencana iklim di Korea Utara, maka orientasi atau latar belakang pembelot menjadi berubah.

Pemerintah Korea Selatan memberikan semacam penghargaan terhadap sejumlah pengungsi Korea Utara yang datang ke Korea Selatan. Hingga Maret 2019 sebanyak 32,000 pengungsi Korea Utara telah tinggal di Korea Selatan dan mendapatkan status kewarganegaraan Korea Selatan. Penghargaan yang berupa bantuan untuk bermukim dan pendampingan sosial membantu mpengungsi Korea Utara mampu sedikit beradaptasi di Korea Selatan (Agency T. Y., 2019).

Ketersediaan lapangan kerja dan peluang – peluang seperti memperoleh pendidikan dan status pekerjaan yang layak tersedia di Korea Selatan. Pengungsi Korea Utara yang telah menjalani proses pendampingan selama di *Hanawon* diizinkan untuk tinggal secara mandiri dan menikmati fasilitas yang tersedia. Walaupun begitu, masyarakat Korea Utara dituntut untuk bekrja keras untuk dapat menghidupi dan meningkatakan pendapatn ekonomi diri sendiri.

Pergolakan politik dan kebijakan ekonomi yang gagal di Korea Utara memberikan dampak buruk bagi masyarakat Korea Utara. Dampak keterpurukan ekonomi serta kelaparan yang berkepanjangan di Korea Utara menimbulkan adanya kegiatan pembelotan masyarakat Korea Utara. Selain itu orientasi politik dan ekonomi Korea Utara yang tidak dapat diprediksi, menjadi sebuah kesulitan bagi semua pihak untuk bersama - sama menyusun pendekatan terkoordinasi ke Korea Utara khususnya dalam mengatasi masalah kemanusiaan.

Pemerintah Korea Selatan dalam merespon fenomena pembelot Korea Utara ini, menunjukkan sikap supportif. Penyediaan bantuan pendampingan dan pemberian subsidi sudah dilakukan sejak masa kepemimpinan park Geun Hye. Pada masa itu bahkan pembelot Korea Utara dijanjikan lapangan pekerjaan dalam lembaga pemerintah. Sebagaimana pada masa itu pembelot dengan latar belakang professional lebih mendominasi.

Pada masa sekarang, Korea Selatan menyadari akan keberagaman dan variasi latar belakang pembelot masyarakat Korea Utara. semenjak Kim Jong Un memimpin Korea Utara latar belakang pembelot semakin variatif begitu pula penyebabnya. Oleh karena itu pemerintah Korea Selatan mengkjai kembali kebijakan terhdapa pembelot Utara, termasuk penangana terhadap ekonomi.

Keterpurukan ekonomi dan diskriminasi sistem sosial oleh elit penguasa menjadi fenomena yang sehari – hari terjadi di Korea Utara. Masyarakat khususnya yang berada dalam klasifikasi kelas rendah, secara tidak langsung tidak diprioritaskan oleh pemerintahnya. Pemerintah yang hanya fokus pada keberlanjutan legitimasi rezim dan partai tidak menjalankan fungsi kekuasaannya dalam melindungi masyarakat dan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu peristiwa dan kebijakan ekonomi pemerintah

tersebut menjadikan fenomena pembelotan masyarakat di Korea Utara terus terjadi.